



RENCANA KERJA (RENJA) 2022

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026.

Dalam Rencana Kerja ini juga dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi dan program berbasis pada analisis lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.

Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2022 sebagai penjabaran visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahun 2022 ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran, sehingga dengan dokumen rencana kerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan system penganggarannya.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.



Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Karimun yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Karimun.

Tg. Balai Karimun, Oktober 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB III PENUTUP	38



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2021	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	18
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan	22
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	26



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sekaligus merupakan acuan bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun dan menata perencanaan pembangunan yang disusun, baik pembangunan jangka menengah yang kemudian dituangkan dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun pembangunan jangka pendek.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian di rinci atau di *breakdown* ke dalam Pembangunan Jangka Pendek atau Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mencapai Visi dan Misi pemerintah daerah kemudian juga menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dengan mempedomani program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam Renstra masing-masing OPD. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bertugas menjaga kestabilan dan Keharmonisan kehidupan ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Karimun yang pada tahun 2021 ini telah melaksanakan serangkaian proses penyusunan Rencana Kerja pembangunan untuk tahun 2022 dengan membaurkan proses *Top Down Planning* dengan *Buttom Up Planning* yang diselenggarakan pada awal tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota



- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi



- Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 adalah :

Agar pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 adalah :

1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahap awal (Renstra 2021-2026).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketenagakerjaan dan perindustrian antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun s/d tahun 2021 sebagai berikut :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2021)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	97,56%	0	0	91,63%		92,25%	92,25%	100%
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun yang disusun	4 Dokumen			0		0	0	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 Dokumen			0		0	0	
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	2 Dokumen			0		0	0	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	58,00%			55,79 %		55,79%	55,79%	100%
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta	3689 Orang			Na (Pandemi Covid 19)		439 Orang	439 Orang	100%
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja berbasis kompetensi	3689 Orang			Na (Pandemi Covid 19)		439 Orang	439 Orang	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi	5 Laporan			0	0	0	
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	15 Unit			0	0	0	
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	5 LPK			0	0	0	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan LPK	8 LPK			0	0	0	
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Laporan Produktivitas perusahaan kecil	5 Laporan			Na	Na	Na	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas Perusahaan kecil	5 Laporan			0	0	0	
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	5 Laporan			0	0	0	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laporan produktivitas tenaga kerja	5 Laporan			0	0	0	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	38 Kasus			5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	100%
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	168 Perusahaan			18 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	36 Perusahaan			4 Perusahaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	100%
	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Laporan Pengesahan PP	7 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Laporan PKB	7 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Pendataan HI	7 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	5 Laporan			3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang tutup	80 Perusahaan			70 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100%
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang berselisih	23 Perusahaan			5 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	100%
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Laporan Verifikasi SP/SB	6 Laporan			0	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	8 LKS Tripartit			6 LKS Tripartit	6 LKS Tripartit	6 LKS Tripartit	100%
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang mendapat pengembangan Jamsostek	180 Perusahaan			0	0	0	0%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	14,2 m			1,6 m	2 m	2 m	100%
						Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	47,25%			44,66%	44,66%	44,66%	100%
2	07	04	201		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	5 Dokumen			0	0	0	
2	07	04	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah orang yang diperdayakan	40 Orang			0	0	0	
2	07	04	201	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Laporan Antar Kerja	5 Laporan			0	0	0	
2	07	04	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan	100 Orang			0	0	0	
2	07	04	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan	4 Laporan			0	0	0	
2	07	04	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta yang diberi kesempatan kerja	100 Orang			0	0	0	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	120 Perusahaan			7 Perusahaan	9 Perusahaan	9 Perusahaan	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan	7 Laporan			1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan	5 Laporan			0		0	0	
2	07	04	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Laporan	5 Laporan			0		0	0	
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	975 Orang			111 Orang		137 Orang	137 Orang	100%
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	5 Laporan			0		0	0	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	88,90%			48,15%		59,65%	59,65%	100%
3	31	2	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	15 Dokumen			0		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
31	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	5 Dokumen			0		0	0	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Kebijakan	3 Dokumen			0		0	0	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen			0		0	0	
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen			0		0	0	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan	1513 IKM			963 IKM		1213 IKM	1213 IKM	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen terhadap pelaksanaan Evaluasi	6 Dokumen			0		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0.76			12%		16,6%	16,6%	100%
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah laporan Penerbitan IUI, IPUI, IUKI IPKI dalam SIInas	10 Laporan			0		0	0	
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	5 Laporan			0		0	0	
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah laporan Pengawasan Perizinan IUI, IPUI, IUKI IPKI	5 Laporan			0		0	0	
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Industri melalui SIInas	15 Laporan			0		0	0	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri	5 Laporan			0		0	0	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Laporan Informasi data Industri dalam SIINas	5 Laporan			0		0	0	
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Laporan Monev Industri	5 Laporan			0		0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%			0		80%	80%	100%
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	37 Dokumen		9 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		100%
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	17 Dokumen		4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		100%
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	22 Dokumen		5 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		100%
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	10 Dokumen		-		-	-		
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan	7 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		100%
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	2208 Org/Bln		300		300	300		100%
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	1428 Org/Bln		204		204	204		100%
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	10 Laporan		0		0	0		
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	14 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	10 Laporan			2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	12 Laporan			0		0	0	
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas	110 Stel			0		0	0	
2	7	1	2.05	5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	5 Laporan			0		0	0	
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	15 Orang			0		0	0	
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adm Umum	56 Laporan			8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100%
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis			3 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Jenis			5 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100%
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	8 Peralatan			7 Peralatan		7 Peralatan	7 Peralatan	100%
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	3 Bahan			3 Bahan		3 Bahan	3 Bahan	100%
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan yang dicetak dan digandakan	20 Laporan			20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	100%
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	17 Bahan					17 Bahan	17 Bahan	100%
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	15 Rapat			15 Rapat		15 Rapat	15 Rapat	100%
2	7	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada	1 Web			1 Web		1 Web	1 Web	100%
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang	6 Laporan			0		0	0	
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	1 Unit			0		0	0	
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	1 Unit			0		0	0	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	10 Unit			0		0	0	
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit			0		0	0	
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	26 Laporan			3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tagihan jasa surat menyurat yang dibayarkan	2 Tagihan			2 Tagihan		2 Tagihan	2 Tagihan	100%
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan	3 Tagihan			3 Tagihan		3 Tagihan	3 Tagihan	100%
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukti Tagihan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayarkan	2 Tagihan			-		-	-	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN yang dibayarkan	28 Orang			26 Orang		26 Orang	26 Orang	
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jenis Pemeliharaan Aset Daerah	21 Laporan			3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau jabatan	2 Unit			2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2 Unit			2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit			10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah dapat terlaksana dengan baik dengan tingkat capaian dan berhasil hal ini ditandai dari 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian sangat baik sementara itu dari target terhadap 1 sasaran strategis Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru nilai capaiannya adalah 8,6 persen karena refocusing anggaran terkait pandemi covid-19.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021 (Akhir Periode Renstra)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realiasi						Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen			59,82	60,19	60,45	60,71	60,96	61,22	62,75	63,23	63,31	58,09	59,76	60,86	104	105,05	105	95,68	98,00	99,41
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Persen			3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	2,45	2,07	3,7	3,29	3,77	50,42	72,05	59,14	103	88,92	99,21	1293
3	Tingkat Pertumbuhan Wirasuahabaru	Persen			2	4	8	11	13	15	1,87	3,24	6	7,30	25,36	1,29	93,5	81,25	75	66,36	195,07	8.6
4	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang berkompeten	Persen			13,77	14,3	14,8	15,4	15,9	16,2	12,75	21,5	16,1	16,92	58,14	23,98	92,59	150,4	108	110	365,66	148,02
5	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Persen			24	25	27	29	30	32	35	40	33	58,3	20	32	145	160	122	201	150	100
6	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen			33,5	34,3	34,7	35	35,4	35,70	34,2	35,4	29,1	41,38	86,70	55,04	102	103	83,7	118	244,91	154,17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun harus diakui pelaksanaan program dan kegiatan banyak yang terkendala dan dibatalkan pelaksanaan kegiatan utamanya sehingga berakibat capaian kegiatan dan program mengalami sedikit penurunan terkait pandemi covid-19.

Salah satu isu yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang lalu adalah munculnya wabah Covid- 19 yang sampai sekarang masih berlanjut. Sebagai akibat adanya wabah Covid-19 yang dianggap sebagai bencana yang tak terduga (*Force majeure*), di seluruh wilayah Indonesia, maka dilakukan refocusing kegiatan dan belanja yang sudah dianggarkan pada setiap program kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2021.

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian refocussing anggaran telah menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan dana yang mendesak dalam penanggulangan wabah covid-19 tersebut. Pergeseran program dan kegiatan yang terjadi pada tahun 2021 antara lain adalah kegiatan :

1. Urusan Ketenagakerjaan :

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi : Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya kebijakan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

2. Urusan Perindustrian

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota : Keutamaan kegiatan ini yakni Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat untuk menambah pendapatan Industri Kecil dan Menengah serta untuk masyarakat tidak terlaksana karena kebijakan anggaran terkait covid-19.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2022 mengacu pada agenda Nawacita kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merupakan prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2019 – 2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) agenda yang didalamnya terdapat sub agenda dan sasaran nawacita itu sendiri serta prioritas lainnya yang tetap menjadi acuan bagi seluruh daerah dalam merumuskan rencana pembangunan daerah termasuk untuk rencana tahun 2022. Adapun agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2022 , yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah menganalisis pokok-pokok dari prioritas nasional tersebut termasuk apa yang menjadi program prioritas pada Departemen Tenaga Kerja dan Kementrian Daerah Tertinggal yang tertuang dalam Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementrian Daerah Tertinggal serta Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2019 – 2024, termasuk program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra dimaksud, sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun . secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetiti dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
A.	Ketenagakerjaan		
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	8%
B.	Perindustrian		
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	62,74 Juta (Rp)

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.01

2. Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
A.	Ketenagakerjaan		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,21%
		2) Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	91,45%

B. Perindustrian		
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk 0,66%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip 73.00

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 yang akan dicapai sesuai dengan target yakni :

Tabel.3.1 Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan
Ketenagakerjaan			
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 3. Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Perindustrian			
Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2022 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2022 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Rencana Kerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

Tabel. IV.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11,600,000,000				11,720,500,000
2	7				URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				11,600,000,000				11,720,500,000
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75,00	4,522,900,000	-	-	75,00	4,490,950,000
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		7 Dokumen	130,000,000			7 Dokumen	100,000,000
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Kabupaten Karimun	2 Dokumen - Renja - Renja RB	51,500,000	APBD		2 Dokumen - Renja - Renja RB	41,500,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	kabupaten Karimun	3 Dok - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	51,500,000	APBD		3 Dok - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	31,500,000
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	Kabupaten Karimun	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	27,000,000	APBD		2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	27,000,000
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan	-	1 Laporan	3,547,000,000			1 Laporan	3,568,000,000
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Kabupaten Karimun	300 orang bulan (25 orang x 12 bulan)	3,507,000,000	APBD		312 orang bulan (26 orang x 12 bulan)	3,513,000,000
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	204 orang bulan (17 orang x 12 bulan)	20,000,000	APBD		204 orang bulan (17 orang x 12 bulan)	30,000,000
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	2 Laporan (- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan)	20,000,000	APBD		2 Laporan (- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan)	25,000,000
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		2 Laporan	15,000,000			2 Laporan	15,000,000
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	Kabupaten Karimun	2 Laporan (- Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD)	15,000,000	APBD		2 Laporan (- Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD)	15,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	-	3 Laporan	60,000,000			2 Laporan	65,000,000
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas	Kabupaten Karimun	55 Stel	30,000,000	APBD		55 Stel	30,000,000
2	7	1	2.05	5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	Kabupaten Karimun	1 Laporan	15,000,000	APBD		1 Laporan	15,000,000
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	Kabupaten Karimun	3 Orang	15,000,000	APBD		3 Orang	20,000,000
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adm Umum	-	8 Laporan	118,050,000			8 Laporan	132,150,000
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	6 Jenis	2,300,000	APBD		6 Jenis	2,500,000
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	7 Jenis	13,000,000	APBD		7 Jenis	14,000,000
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kabupaten Karimun	8 Peralatan	6,000,000	APBD		8 Peralatan	7,000,000
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic	Kabupaten Karimun	3 Bahan	7,300,000	APBD		3 Bahan	7,500,000
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan yang dicetak dan digandakan	Kabupaten Karimun	20 Laporan	7,650,000	APBD		20 Laporan	7,750,000
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	17 Bahan	15,300,000	APBD		17 Bahan	15,400,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kabupaten Karimun	15 Rapat	42,500,000	APBD		15 Rapat	44,000,000
2	7	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada	Kabupaten Karimun	1 Web	24,000,000	APBD		1 Web	34,000,000
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang	-	2 Laporan	55,000,000			0	20,000,000
2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kabupaten Karimun	5 Unit	25,000,000	APBD		2 Unit	10,000,000
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karimun	4 Unit	30,000,000	APBD		2 Unit	10,000,000
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	-	4 Laporan	540,750,000			4 Laporan	543,000,000
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tagihan jasa surat menyurat yang dibayarkan	Kabupaten Karimun	2 Tagihan	1,300,000	APBD		2 Tagihan	1,500,000
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan	Kabupaten Karimun	3 Tagihan	18,000,000.00	APBD		3 Tagihan	18,500,000.00
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukti Tagihan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayarkan	Kabupaten Karimun	2 Tagihan	10,000,000	APBD		2 Tagihan	11,000,000
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN yang dibayarkan	Kabupaten Karimun	28 Orang	511,450,000.00	APBD		28 Orang	512,000,000.00



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jenis Pemeliharaan Aset Daerah	0.00	3 Laporan	57,100,000.00			3 Laporan	47,800,000.00
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau jabatan	Kabupaten Karimun	2 Unit	40,100,000.00	APBD		2 Unit	30,200,000.00
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kabupaten Karimun	2 Unit	12,000,000.00	APBD		2 Unit	12,100,000.00
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karimun	10 Unit	5,000,000.00	APBD		10 Unit	5,500,000.00
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja		93,31%	300,000,000			0	0.00
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun yang disusun		2 Dokumen	300,000,000			0	0.00
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	150,000,000			0	0.00
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro		1 Dokumen	150,000,000			0	0.00
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		56,45%	5,097,100,000			56,45%	5,669,550,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta	-	550 Orang	4,762,100,000			620 Orang	5,404,550,000
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja berbasis kompetensi	Kabupaten Karimun	550 Orang	4,562,100,000	APBD	APBD PROV	620 Orang	5,219,550,000
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	85,000,000
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kabupaten Karimun	5 Unit	100,000,000	APBD	APBN	5 Unit	100,000,000
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	-	2 LPK	135,000,000			3 LPK	130,000,000
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan LPK	Kabupaten Karimun	2 LPK	135,000,000	APBD		3 LPK	130,000,000
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Laporan Produktivitas perusahaan kecil		1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	75,000,000
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas Perusahaan kecil	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	75,000,000
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	-	1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	60,000,000
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laporan produktivitas tenaga kerja	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	60,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	-	45.15%	780,000,000			46,50%	830,000,000
						Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	-	2 m	100,000,000			2,1 m	110,000,000
2	07	04	201		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	-	1 Dokumen	450,000,000			1 Dokumen	470,000,000
2	07	04	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah orang yang diperdayakan	Kabupaten Karimun	20 Orang	75,000,000	APBD		20 Orang	50,000,000
2	07	04	201	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Laporan Antar Kerja	Kabupaten Karimun	1 Laporan	75,000,000	APBD		1 Laporan	100,000,000
2	07	04	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan	Kabupaten Karimun	20 Orang	85,000,000	APBD		20 Orang	95,000,000
2	07	04	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	65,000,000	APBD		1 Laporan	75,000,000
2	07	04	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta yang diberi kesempatan kerja	Kabupaten Karimun	20 Orang	150,000,000	APBD		20 Orang	150,000,000
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	-	12 Perusahaan	330,000,000			17 Perusahaan	360,000,000
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	110,000,000	APBD		1 Laporan	120,000,000
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	110,000,000	APBD		1 Laporan	120,000,000
2	07	04	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	110,000,000	APBD		1 Laporan	120,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	-	137 Orang	100,000,000			144 Orang	110,000,000
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	110,000,000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi		5 Kasus	800,000,000			5 Kasus	620,000,000
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP		22 Perusahaan	120,000,000			24 Perusahaan	100,000,000
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB		5 Perusahaan	140,000,000			5 Perusahaan	135,000,000
	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Laporan Pengesahan PP	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000
	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Laporan PKB	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Pendataan HI	Kabupaten Karimun	1 Laporan	140,000,000	APBD		1 Laporan	135,000,000
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	-	4 Lapaoran	540,000,000			3 Laporan	385,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang tutup	Kabupaten Karimun	6 Perusahaan	85,000,000	APBD		6 Perusahaan	65,000,000
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang berselisih	Kabupaten Karimun	3 Perusahaan	100,000,000	APBD		3 Perusahaan	65,000,000
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Laporan Verifikasi SP/SB	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	65,000,000
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Kabupaten Karimun	7 LKS Tripartit	135,000,000	APBD		7 LKS Tripartit	130,000,000
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang mendapat pengembangan Jamsostek	Kabupaten Karimun	50 Perusahaan	120,000,000	APBD		50 Perusahaan	60,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PDRB Perkapita							
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk			1,100,000,000				1,640,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	-	69,65%	550,000,000			77,15%	1,270,000,000
3	31	2	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	-	4 Dokumen	550,000,000			1 Dokumen	1,270,000,000
31	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Kebijakan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan	Kabupaten Karimun	100 IKM	1,205,000,000	APBD	APBD PROV	20 IKM	975,000,000
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen terhadap pelaksanaan Evaluasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	70,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	26,6%	200,000,000			44%	100,000,000
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah laporan Penerbitan IUI, IPUI, IUKI IPKI dalam SIINas	-	2 Laporan	200,000,000			2 Laporan	100,000,000
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah laporan Pengawasan Perizinan IUI, IPUI, IUKI IPKI	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	-	1 Dokumen	350,000,000			1 Dokumen	270,000,000
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Industri melalui SIINas	-	3 Laporan	350,000,000			3 Laporan	270,000,000
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000
3	31	4	2.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Laporan Informasi data Industri dalam SIINas	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	60,000,000
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Laporan Monev Industri	Kabupaten Karimun	1 Laporan	150,000,000	APBD		1 Laporan	160,000,000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini diharapkan penerapan dan pelaksanaa Program serta kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun betu-betul dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan dan Perindustrian yang ada di Kabupten Karimun,

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2022 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat member masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terima kasih.